

GUNTINGAN BERITA

CODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	KOMPAS	14	20-08-2002

Lambat, Proses Hukum Tujuh Kapal Keruk Pasir Laut

JAKARTA, KOMPAS — Proses hukum terhadap tujuh kapal keruk pasir laut yang ditahan sejak satu bulan lalu oleh TNI AL di perairan Riau dinilai berjalan lambat. Ini terjadi akibat tidak kooperatifnya pemilik kapal karena pelanggarannya diduga cukup banyak.

Tuduhan yang ditimpakan aparat penegak hukum diduga bakal cuma pelanggaran Undang-Undang (UU) Pelayaran serta UU Keimigrasian, sedangkan kesalahan lain yang jauh lebih mendasar, seperti pelanggaran UU Pertambangan, izin kuasa pertambangan

dan UU Lingkungan belum disentuh.

Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri di Jakarta, Senin (19/8), mengakui, Tim Pengendalian Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) menemui sejumlah kendala serius dalam proses penyelidikan. Salah satunya, para pemilik kapal belum bersedia menyerahkan jurnal kapal. Padahal, dalam dokumen tersebut selalu tercatat volume, waktu, tempat pengangkutan, dan pembongkaran pasir laut.

"Sikap tidak kooperatif dari pemilik kapal itulah yang

membuat proses penyelidikan pun berjalan agak lambat. Sikap ini diduga kuat karena pelanggaran yang dilakukan ketujuh kapal itu cukup banyak, antara lain menyangkut kuasa pertambangan serta volume pasir yang dikeruk dan diangkut," kata Rokhmin Dahuri.

Menteri yang juga Ketua TP4L Pusat itu menegaskan, "Kalau pelanggaran yang dituduhkan terhadap ketujuh kapal itu hanya UU Pelayaran dan UU Keimigrasian, maka hukuman bagi mereka ringan sekali. Padahal, aktivitas kapal-kapal itu sudah terkategori mencuri, sebab mengeruk pasir

di luar kawasan kuasa pertambangan," tambah Rokhmin Dahuri.

Sekretaris TP4L Pusat Indroyono Soesilo membenarkan jika timnya sudah memerintahkan syahbandar di Riau untuk menyita jurnal kapal tersebut sejak pekan lalu. "Itu benar. Tetapi, baru sebagian kecil pemilik kapal yang bersedia menyerahkan jurnal. Nanti Kamis ini kita akan mempublikasikan hasil penyitaan jurnal kapal dan perkembangan proses penyelidikan tujuh kapal keruk pasir laut itu," jelas Indroyono Soesilo. (JAN)